

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan sebagai penopang keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara terutama untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan keasadaran masyarakat untuk membayar pajak demi meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakannya melaksanakan progam tax amnesty yang diregulasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Mendapatkan tax amnesty artinya data laporan yang selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. dalam hal tax amnesty juga menuntut apartur pajak dalam hal ini yaitu fiskus untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai harta kekayaan yang disampaikan wajib pajak. Perlindungan hukum terhadap data dan informasi wajib pajak dalam rangka tax amnesty di Indonesia yaitu bahwa status data dan informasi yang disampaikan tersebut sebagai verifikasi data dan informasi yang berguna untuk menjamin informasi yang diungkapkan adalah informasi yang jujur, lengkap, dan sebenar-benarnya, serta sebagai basis data perpajakan yang diharapkan memberikan penerimaan pajak yang berkesinambungan. Ketika status data dan informasi yang telah disampaikan wajib pajak dibocorkan, disebarluaskan dan/atau diberitahuakan kepada pihak lain maka wajib pajak dapat menempuh upaya hukum pengajuan gugatan ke pengadilan pajak.

Kata Kunci : tax amnesty, perlindungan hukum, data dan informasi.

ABSTRACT

Tax is one of the sources income of the country which is the dominant as a support sustainability government system of a country especially for National construction. Therefore, government attempts to tell people about paying tax for increasing of nation income per-capita by means of the policy to implements tax amnesty program that regulated on construction law no.11 of 2016 regarding tax amnesty. Obtain tax amnesty, it means report data that had been deemed to have been pardoned an on some tax debts are eliminated. According to fiskus or tax authorities, tax amnesty is also to provide guarantee the confidentiality of data and information submitted regarding ealth the tax payer. According to the case, it makes the writer to do some law research to knows the guarantee of legal protection that be given by the government toward data and information on the status of the tax payer in order to use the tax amnesty statute approach and conceptual approach. The result of essay/final project/research in terms of legal protection of taxpayer information and data in order to tax amnesty in Indonesia, namely that the status of the data and information submitted as verification of data and information that is useful to ensure the information disclosed is information that is truthful, complete, and truth actually, as well as a data base of taxation is expected to provide a suistainable tax revenues. When the status of data and information that has been conveyed by tax payer was leaked, disseminated and/or notified to the other party, the tax payer may take legal action to the tax court .

Keyword : tax amnesty, legal protection, data and information